



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Sidang	:	V
Rapat	:	Ke- Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Jenis Rapat	:	Senin, 4 Juni 2018
Hari/Tanggal	:	Terbuka
Sifat	:	13.35 WIB s.d 17.30 WIB
Pukul	:	Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Tempat	:	Membahas Persiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Dalam Rangka Penanggaran Arus Mudik Lebaran Tahun 2018
Acara	:	Ir. Fary Djemmy Francis, MMA Dra. Prima MB. Nuwa, Msi dari 49 orang Anggota Komisi V DPR RI
Ketua Rapat	:	Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Kakorlantas
Sekretaris	:	Polri besera jajaran terkait lainnya.
Hadir Anggota	:	
Hadir Mitra	:	

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.35 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Basarnas dan Kakorlantas Polri, beserta jajaran terkait lainnya pada hari ini adalah untuk membahas mengenai persiapan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka penanganan arus mudik lebaran Tahun 2018.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Kakorlantas Polri untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN..../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan selaku Koordinator penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Nasional tahun 2018/1439 H bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas, dan Korlantas Polri serta operator pengelola jasa transportasi nasional, untuk mempersiapkan Angkutan Lebaran secara lebih baik.
2. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mewujudkan peningkatan pelayanan antar moda dan antar wilayah, serta konektifitas yang handal dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2018/1439 H.
3. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dan melakukan antisipasi terhadap permasalahan yang terjadi pada arus mudik dan balik Lebaran tahun 2017, antara lain penguraian cepat di lokasi berpotensi macet; meningkatkan kualitas pelayanan rest area (toilet, BBM, Mushala, tenaga medis/posko kesehatan, dan ketersediaan tempat parkir); memaksimalkan ramp check dan pengawasan pelayanan tarif di seluruh moda transportasi; menyelenggarakan penataan program mudik gratis dengan lebih baik, sehingga upaya peningkatan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan dapat tercapai secara optimal.
4. Komisi V DPR RI sepakat untuk mengagendakan rapat evaluasi tentang penanganan arus mudik dan arus balik Lebaran segera setelah selesainya Operasi Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2018 /1439 H.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 4 Juni 2018
KETUA RAPAT,

LASARUS

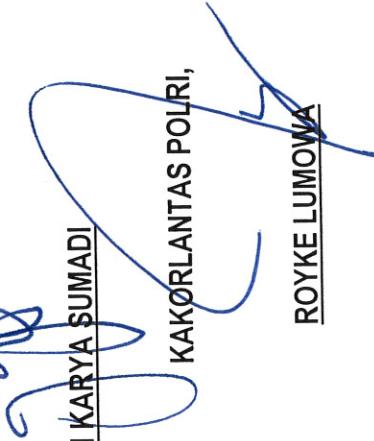
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASOEKI HADIMOELJONO

KEPALA BMKG,

DWIKORITA KARNAWATI

MENTERI PERHUBUNGAN,


BUDI KARYA SUMADI,
KAKORLANTAS POLRI,
ROYKE LUMOWA

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

M. SYAUGI